



## Sinergi Antara Moralitas dan Profesionalisme dalam Etika Administrasi Publik di Kota Palangka Raya

Yostin Dios<sup>1\*</sup>, Delon<sup>2</sup>, Mikel Fernando<sup>3</sup>, Intan Kumalasari<sup>4</sup>

<sup>1-4</sup> Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Palangka Raya, Indonesia

Email: [yostiindios@gmail.com](mailto:yostiindios@gmail.com)

\*Penulis Korespondensi: [yostiindios@gmail.com](mailto:yostiindios@gmail.com)

**Abstract.** *This study examines the synergy between morality and professionalism as foundational components in shaping ethical behavior among civil servants in Palangka Raya City. The research is motivated by persistent ethical issues within local government bureaucracy, despite ongoing reform initiatives that emphasize integrity and accountability in public service. Using a quantitative explanatory survey design, data were collected from civil servants across several regional government institutions and analyzed through multiple linear regression to determine the influence of morality and professionalism on ethical behavior. The findings indicate that both variables significantly contribute to the formation of ethical conduct, with morality demonstrating a slightly stronger influence compared to professionalism, thereby confirming theoretical concepts which argue that ethical public administration requires both personal integrity and professional competence. These results highlight the importance of strengthening institutional ethics programs through character building, competency-based professionalism, and transparent supervisory mechanisms to ensure consistency of ethical behavior across administrative practices. The study also acknowledges methodological limitations related to the exclusive use of quantitative measures, suggesting that future research may integrate qualitative approaches to capture deeper subjective meanings of morality and professionalism within public sector settings.*

**Keywords:** ASN, Ethics, Morality, Palangka Raya City, Professionalism.

**Abstrak.** Penelitian ini mengkaji sinergi antara moralitas dan profesionalisme sebagai komponen mendasar dalam membentuk perilaku etis Aparatur Sipil Negara di Kota Palangka Raya. Kajian ini dilatarbelakangi oleh masih munculnya berbagai persoalan etika birokrasi daerah, meskipun reformasi administrasi terus digencarkan untuk memperkuat integritas dan akuntabilitas pelayanan publik. Dengan menggunakan desain survei eksplanatori kuantitatif, data dikumpulkan dari sejumlah ASN di berbagai instansi pemerintah daerah dan dianalisis menggunakan regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh moralitas dan profesionalisme terhadap perilaku etis. Temuan menunjukkan bahwa kedua variabel berpengaruh signifikan, dengan moralitas memiliki pengaruh yang sedikit lebih kuat dibandingkan profesionalisme, sehingga mendukung teori bahwa etika administrasi publik terbentuk melalui perpaduan antara integritas personal dan kompetensi profesional. Hasil penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan etika kelembagaan melalui pembinaan karakter, peningkatan profesionalisme berbasis kompetensi, serta mekanisme pengawasan yang lebih transparan guna memastikan konsistensi perilaku etis aparatur. Penelitian ini juga menyadari keterbatasan metodologis terkait penggunaan pendekatan kuantitatif semata, sehingga penelitian selanjutnya disarankan mengombinasikan pendekatan kualitatif untuk menggali makna moralitas dan profesionalisme secara lebih mendalam dalam konteks sektor publik.

**Kata Kunci:** ASN, Etika, Kota Palangka Raya, Moralitas, Profesionalisme.

### 1. LATAR BELAKANG

Dalam sistem administrasi publik Indonesia, etika menjadi fondasi fundamental yang menentukan kualitas perilaku birokrasi dalam menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Nilai-nilai etika tidak hanya dipahami sebagai seperangkat norma formal, tetapi juga sebagai refleksi mendalam terhadap integritas moral dan komitmen profesional aparatur negara. Moralitas berperan sebagai orientasi internal yang mengarahkan tindakan ASN agar

selaras dengan standar kepatutan publik dan tuntutan etika dalam pemerintahan demokratis. Di sisi lain, profesionalisme menjadi penentu kualitas eksekusi tugas yang menuntut kompetensi, konsistensi, dan disiplin struktural dalam setiap aktivitas birokrasi. Hubungan antara moralitas dan profesionalisme membentuk kerangka etis yang memastikan bahwa otoritas birokrasi digunakan secara bertanggung jawab. Dalam konteks administrasi publik, keduanya merupakan pilar yang saling menguatkan dan tidak dapat dipisahkan dalam mencapai pemerintahan yang akuntabel. Oleh karena itu, penting untuk memahami dinamika kedua konsep tersebut dalam upaya membangun etika administrasi yang kokoh di tingkat pemerintahan daerah (Saragih, 2020; Prabowo & Widodo, 2021; Hartati, 2022).

Kota Palangka Raya sebagai pusat pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah menghadapi tuntutan semakin besar untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di berbagai sektor. Meskipun reformasi birokrasi telah berlangsung dalam beberapa dekade terakhir, berbagai persoalan etika masih muncul secara konsisten dalam praktik administrasi pemerintahan. Masalah seperti ketidaktepatan waktu, perilaku diskriminatif, dan kurangnya keteladanan moral sering menjadi sorotan publik. Kondisi ini menunjukkan adanya jarak antara idealitas etika administrasi dan realitas birokrasi yang masih dipengaruhi budaya kerja konvensional. Transformasi moralitas dan profesionalisme aparatur menjadi keharusan untuk memastikan pelayanan yang responsif dan adil. Selain itu, dinamika sosial yang semakin kompleks menuntut ASN untuk mengintegrasikan nilai etika dengan kapasitas teknokratis secara berimbang. Kompleksitas tersebut mendorong perlunya pengkajian mendalam mengenai konstruksi etika aparatur di Palangka Raya (Lestari, 2019; Handayani & Sutopo, 2020; Yusuf, 2021).

Etika administrasi publik secara teoritis dipandang sebagai upaya sistematis untuk menjaga perilaku aparatur tetap berada dalam koridor keadaban publik melalui prinsip integritas, akuntabilitas, dan kejujuran. Prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai instrumen kontrol moral yang membimbing ASN dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan kepentingan publik. Dalam konteks Palangka Raya, penguatan etika menjadi semakin urgen karena meningkatnya intensitas interaksi antara aparatur dan masyarakat dalam berbagai layanan dasar. Kegagalan aparatur dalam menjaga standar etika dapat menurunkan legitimasi pemerintah di mata publik dan menimbulkan masalah kepercayaan. Oleh sebab itu, moralitas individu aparatur menjadi fondasi yang menggerakkan perilaku etis di tingkat institusional. Profesionalisme hadir sebagai elemen pelengkap yang memastikan bahwa tindakan tersebut tidak hanya bermoral tetapi juga efektif dan berkualitas. Sinergi keduanya perlu dikaji lebih

mendalam melalui pendekatan empiris dan teoritis yang kuat (Ananda, 2020; Rudianto, 2021; Mahfud, 2022).

Dalam kerangka administrasi modern, moralitas birokrat menjadi faktor yang memengaruhi cara ASN merespons dilema etis dalam pekerjaannya. ASN dengan basis moral yang kuat cenderung mampu mempertahankan prinsip integritas meskipun berada dalam tekanan struktural maupun situasional. Moralitas juga berdampak pada kemampuan aparatur untuk menahan perilaku koruptif, kolusif, dan berbagai bentuk penyalahgunaan wewenang. Namun demikian, moralitas tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan profesionalisme yang membimbing aparatur menjalankan tugas secara teknis. Profesionalisme berfungsi menghindarkan tindakan impulsif yang didasarkan semata-mata pada penilaian moral tanpa pertimbangan administratif yang memadai. Keduanya saling melengkapi dalam membentuk perilaku etis yang konsisten dan terukur di lingkungan birokrasi. Oleh karena itu, integrasi nilai moral dan profesional menjadi aspek kritis dalam fungsi pelayanan publik (Wijaya, 2018; Nugroho, 2019; Permata, 2021).

Profesionalisme dalam administrasi publik tidak hanya diwujudkan dalam penguasaan kompetensi teknis, tetapi juga dalam kapasitas untuk memahami kompleksitas tata kelola pemerintahan. ASN dituntut untuk mampu menjalankan tugas dengan akurasi, objektivitas, dan orientasi pada hasil yang memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Dalam konteks Palangka Raya, profesionalisme memiliki peran penting karena mencerminkan kesiapan aparatur menghadapi tuntutan administratif yang semakin berkembang. Profesionalisme juga memengaruhi kemampuan ASN mengelola sumber daya secara efektif, termasuk waktu, anggaran, dan informasi publik. Kelemahan dalam kompetensi profesional sering kali memicu perilaku tidak etis karena minimnya pemahaman terhadap prosedur dan standar kerja. Dengan demikian, penguatan profesionalisme merupakan langkah strategis untuk membangun budaya etika yang kokoh. Upaya tersebut perlu dikaji secara komprehensif terhadap dinamika birokrasi lokal (Sutrisno, 2020; Dewi, 2021; Ramadhan & Salim, 2022).

Sinergi antara moralitas dan profesionalisme dapat berfungsi sebagai mekanisme yang meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan menciptakan aparatur yang kompeten sekaligus berintegritas. Kolaborasi kedua nilai tersebut mendorong ASN untuk tidak hanya bertindak sesuai aturan, tetapi juga berdasarkan pertimbangan moral yang matang. Sinergi ini berpengaruh terhadap meningkatnya kepercayaan publik serta memperkuat legitimasi pemerintah dalam menjalankan fungsi pelayanan. Dalam birokrasi Palangka Raya, sinergi tersebut diperlukan untuk menghadapi tantangan etika yang sering muncul dalam hubungan aparatur dan masyarakat. Kekuatan sinergi ini terletak pada kemampuannya menghasilkan

keputusan publik yang etis, rasional, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian mengenai sinergi moralitas dan profesionalisme menjadi penting untuk memetakan faktor determinannya. Kajian semacam ini berkontribusi pada pengembangan kerangka etika administrasi publik yang lebih adaptif (Hasanah, 2020; Muzakir, 2021; Santoso, 2022).

Tantangan etika yang dihadapi aparatur di Palangka Raya tidak dapat dilepaskan dari budaya organisasi birokrasi yang masih dipengaruhi model administratif tradisional. Pola hubungan hierarkis yang kaku sering kali membatasi ruang bagi aparatur untuk mengembangkan sikap profesional yang berorientasi pelayanan. Dalam situasi tersebut, pelanggaran etika dapat muncul akibat tekanan struktural atau tuntutan atasan yang bertentangan dengan nilai moral aparatur. Selain itu, kurangnya keteladanan etis di tingkat pimpinan dapat menjadi hambatan signifikan dalam pembentukan moralitas ASN. Untuk itu, reformasi budaya organisasi menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pembentukan sinergi moralitas dan profesionalisme. Proses ini memerlukan pendekatan holistik melalui internalisasi nilai etika, mekanisme supervisi, dan penguatan regulasi. Kebutuhan ini menegaskan urgensi penelitian terhadap dinamika etika birokrasi di Palangka Raya (Ardian, 2019; Wahyuni, 2020; Farida, 2022).

Dalam teori administrasi publik kontemporer, etika dipandang sebagai pilar yang mendorong terciptanya pelayanan publik yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Etika tidak hanya berkaitan dengan perilaku individu, tetapi juga mencakup aspek struktural yang membentuk pola hubungan antara birokrasi dan warga negara. Palangka Raya sebagai kota yang berkembang memerlukan kebijakan etika yang mampu merespons perubahan sosial dan tuntutan publik yang meningkat. Kebijakan tersebut harus dikembangkan melalui integrasi nilai moral dan kompetensi profesional aparatur secara sistematis. Penguatan kebijakan etika juga berfungsi sebagai instrumen untuk mengendalikan penyalahgunaan wewenang dan meningkatkan transparansi pelayanan publik. Selain itu, etika yang terinstitusionalisasi dapat menciptakan lingkungan birokrasi yang lebih responsif dan akuntabel. Oleh karena itu, relevansi penelitian ini semakin penting dalam konteks modernisasi pemerintahan daerah (Kurniawan, 2019; Suharto, 2021; Hidayat, 2022).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana moralitas dan profesionalisme berinteraksi membentuk etika administrasi publik di Kota Palangka Raya. Analisis ini diharapkan mampu mengungkap faktor-faktor yang menentukan kualitas perilaku etis ASN dalam menjalankan tugas pelayanannya. Penelitian ini juga menilai sejauh mana konteks sosial-birokratis di Palangka Raya memengaruhi dinamika moralitas dan profesionalisme aparatur. Selain itu, kajian ini memberikan dasar empiris bagi perumusan

kebijakan etika yang lebih efektif pada level pemerintahan daerah. Penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan literatur terkait sinergi nilai-nilai etika dalam konteks birokrasi lokal. Dengan pendekatan analitis yang komprehensif, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan teori etika administrasi publik. Relevansi penelitian ini menjadi semakin penting dalam upaya membangun pemerintahan yang berintegritas di Indonesia (Simanjuntak, 2020; Wibisono, 2021; Nurhayati, 2022).

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain survei eksplanatori yang bertujuan menganalisis hubungan kausal antara moralitas ( $X_1$ ), profesionalisme ( $X_2$ ), dan perilaku etis ASN ( $Y$ ) dalam konteks administrasi publik di Kota Palangka Raya. Populasi penelitian adalah seluruh Aparatur Sipil Negara pada instansi pemerintah daerah Kota Palangka Raya, sedangkan penentuan sampel dilakukan melalui teknik proportionate stratified random sampling untuk memastikan keterwakilan unit kerja yang berbeda sesuai struktur birokrasi. Pengumpulan data menggunakan kuesioner berskala Likert lima poin yang telah melalui proses uji validitas dan reliabilitas, di mana seluruh indikator dinyatakan valid dengan nilai korelasi  $> 0,30$  dan reliabel dengan nilai Cronbach's Alpha  $> 0,70$  sesuai standar ilmiah. Instrumen disusun berdasarkan rujukan teoritis mengenai etika administrasi publik, moralitas birokrasi, dan profesionalisme aparatur, sehingga indikator yang digunakan mencerminkan konstruk perilaku etis dalam organisasi pemerintahan. Analisis data dilakukan melalui regresi linier berganda dengan merujuk pada prosedur umum pengujian statistik, termasuk uji-F untuk menilai signifikansi model dan uji-t untuk melihat pengaruh parsial variabel independen terhadap variabel dependen, serta uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) untuk mengukur kemampuan model menjelaskan variabel perilaku etis ASN. Model penelitian yang digunakan dirumuskan sebagai  $Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$ , di mana  $Y$  merepresentasikan perilaku etis ASN,  $X_1$  melambangkan moralitas aparatur,  $X_2$  menunjukkan profesionalisme kerja, dan  $\varepsilon$  merupakan error term yang menangkap variabel-variabel di luar model. Keseluruhan proses analisis dilakukan menggunakan perangkat lunak statistik untuk memastikan akurasi perhitungan dan ketepatan interpretasi hasil penelitian sesuai standar metodologis penelitian administrasi publik.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Secara umum, hasil deskriptif menunjukkan bahwa responden cenderung memberikan penilaian positif terhadap indikator moralitas dan profesionalisme, yang mengindikasikan

kecenderungan sikap etis dalam konteks birokrasi daerah. Temuan ini memberikan dasar kuat untuk menganalisis hubungan antarvariabel secara lebih mendalam melalui uji statistik inferensial. Dengan demikian, bagian hasil ini menguraikan temuan empiris yang menjadi dasar bagi pembahasan teoritis dan interpretasi akademik secara komprehensif.

Analisis deskriptif menunjukkan bahwa moralitas ASN berada pada kategori tinggi berdasarkan nilai rata-rata 4,21 dari skala lima poin, yang menunjukkan bahwa aparatur memiliki landasan nilai personal yang kuat dalam melaksanakan tugas publik. Profesionalisme juga memperoleh rata-rata 4,18, mencerminkan komitmen ASN terhadap standar kompetensi, etika kerja, dan kualitas pelayanan. Sementara itu, perilaku etis ASN memperoleh rata-rata 4,09, yang menggambarkan bahwa birokrat di Kota Palangka Raya cenderung mematuhi prinsip-prinsip etika administrasi publik dalam pengambilan keputusan dan interaksi layanan. Data ini dapat dilihat pada Tabel 1 sebagai ringkasan statistik deskriptif. Tingginya skor pada ketiga variabel mengindikasikan bahwa lingkungan birokrasi daerah memiliki fondasi etika yang relatif baik, meskipun analisis lanjutan diperlukan untuk melihat hubungan kausal yang lebih spesifik. Deskripsi ini juga menjadi indikator awal mengenai kemungkinan adanya sinergi ataupun ketidakseimbangan antara moralitas dan profesionalisme sebagaimana dihipotesiskan dalam model penelitian.

**Tabel 1.** Statistik Deskriptif Variabel Penelitian.

Variabel	Mean	Standar Deviasi	Kategori
Moralitas ASN ( $X_1$ )	4.21	0.53	Tinggi
Profesionalisme ( $X_2$ )	4.18	0.49	Tinggi
Perilaku Etis ASN ( $Y$ )	4.09	0.58	Tinggi

*Sumber: Data primer diolah (2025)*

Hasil uji validitas dan reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh indikator variabel dinyatakan valid dengan nilai korelasi item di atas 0,30 dan reliabel dengan nilai Cronbach's Alpha lebih dari 0,70. Dengan demikian, instrumen penelitian dianggap layak digunakan untuk mengukur variabel-variabel penelitian. Selain itu, hasil uji normalitas menunjukkan distribusi data yang memenuhi asumsi analisis regresi, dengan nilai signifikansi Kolmogorov-Smirnov lebih besar dari 0,05. Kondisi ini memperkuat validitas analisis inferensial yang digunakan untuk menguji model hubungan antara moralitas, profesionalisme, dan perilaku etis ASN. Temuan ini sejalan dengan berbagai penelitian sebelumnya yang menekankan pentingnya kualitas instrumen dalam menghasilkan analisis yang kredibel. Oleh sebab itu, hasil selanjutnya dapat diinterpretasikan dengan keyakinan metodologis yang tinggi.

Uji regresi linier berganda menunjukkan bahwa model penelitian signifikan secara simultan dengan nilai F-hitung sebesar 45,27 dan signifikansi 0,000, yang berarti bahwa moralitas dan profesionalisme bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap perilaku etis ASN. Koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,42 menunjukkan bahwa kedua variabel independen mampu menjelaskan 42% variasi perilaku etis, sedangkan sisanya dipengaruhi faktor lain di luar model. Hasil ini menegaskan bahwa perilaku etis dalam birokrasi bukan semata-mata dipengaruhi aspek moralitas personal, tetapi juga dipengaruhi standar kompetensi, disiplin, dan profesionalisme formal yang melekat pada aparatur. Secara empiris, temuan ini menegaskan relevansi teori etika administrasi publik mengenai pentingnya integrasi nilai moral dan tuntutan profesi dalam menjalankan pelayanan publik.

Uji parsial menunjukkan bahwa moralitas ASN memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku etis dengan nilai t-hitung 5,31 dan signifikansi  $< 0,01$ . Koefisien regresi bernilai positif ( $\beta_1 = 0,36$ ), yang menunjukkan bahwa semakin tinggi moralitas individu, semakin tinggi pula kecenderungan ASN berperilaku etis. Temuan ini mengonfirmasi argumentasi teoritis bahwa integritas moral merupakan fondasi dasar dalam membentuk tindakan etis birokrasi. Hal ini juga didukung penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa moralitas mampu membentuk pola pengambilan keputusan yang menjunjung kepentingan publik. Dengan demikian, dalam konteks Kota Palangka Raya, moralitas ASN terbukti menjadi salah satu elemen paling signifikan dalam menjaga kualitas pemerintahan daerah.

Pada sisi lain, profesionalisme ASN juga menunjukkan pengaruh signifikan terhadap perilaku etis dengan nilai t-hitung 4,88 dan signifikansi  $< 0,01$ . Koefisien regresi positif ( $\beta_2 = 0,29$ ) menunjukkan bahwa semakin tinggi profesionalisme, semakin besar kecenderungan ASN bertindak sesuai standar etika administrasi publik. Hal ini menunjukkan bahwa profesionalisme tidak hanya berfungsi sebagai indikator kompetensi, tetapi juga sebagai mekanisme pengendalian perilaku kerja yang mendorong kepatuhan terhadap norma pelayanan publik. Temuan tersebut mendukung argumen literatur bahwa profesionalisme merupakan faktor penentu terbentuknya konsistensi perilaku birokrasi yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, profesionalisme menjadi instrumen struktural yang menopang moralitas ASN.

Pembahasan hasil penelitian menunjukkan adanya sinergi antara moralitas dan profesionalisme dalam membentuk perilaku etis ASN, di mana kedua variabel saling melengkapi dan memperkuat. Moralitas memberikan arah nilai dan prinsip dasar, sedangkan profesionalisme memberikan kerangka kerja teknis dan prosedural yang memperkuat tindakan etis dalam pelayanan publik. Sinergi ini sejalan dengan konsep etika administrasi publik yang

menyatakan bahwa perilaku etis lahir dari perpaduan antara kualitas moral individu dan pembiasaan profesional organisasi. Dalam konteks birokrasi Kota Palangka Raya, kombinasi ini tampak menjadi prasyarat dalam menciptakan lingkungan kerja yang berintegritas dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, hasil penelitian menegaskan bahwa upaya peningkatan etika birokrasi harus melibatkan kedua aspek secara simultan.

Temuan penelitian ini juga memperlihatkan adanya tantangan, khususnya ketidakseimbangan antara moralitas personal dan tuntutan struktural profesionalisme yang masih perlu dikelola dengan tepat. Beberapa responden menunjukkan nilai profesionalisme yang tinggi tetapi tidak selalu diikuti nilai moralitas yang konsisten, sehingga berpotensi menciptakan perilaku administratif yang formalistik tetapi kurang berorientasi nilai. Hal ini menunjukkan pentingnya pendekatan pelatihan etika yang tidak hanya fokus pada standar prosedural, tetapi juga pembentukan karakter ASN. Ketidakseimbangan ini sering ditemukan dalam birokrasi daerah, yang disebabkan oleh tekanan administratif, budaya organisasi, dan konflik kepentingan tertentu. Dengan demikian, penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa pembinaan moralitas aparatur tetap menjadi bagian penting dalam reformasi birokrasi.

Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, hasil penelitian ini konsisten dengan temuan bahwa moralitas dan profesionalisme merupakan prediktor kuat perilaku etis dalam organisasi pemerintahan. Beberapa penelitian internasional juga menunjukkan pola yang sama, di mana peningkatan etika birokrasi sangat dipengaruhi oleh kombinasi integritas individu dan disiplin profesional. Namun, penelitian ini memberikan kontribusi baru terkait konteks lokal Palangka Raya, terutama dalam memahami dinamika birokrasi daerah yang memiliki karakteristik sosial, budaya, dan politik yang khas. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkaya literatur administrasi publik mengenai bagaimana kondisi lokal dapat mempengaruhi format sinergi antara moralitas dan profesionalisme dalam praktik birokrasi.

Secara teoretis, penelitian ini memperkuat model etika administrasi publik yang menekankan interaksi antara nilai moral dan profesionalisme sebagai basis perilaku etis aparatur negara. Temuan ini memberikan dukungan empiris bahwa model tersebut relevan dalam konteks pemerintahan daerah Indonesia. Secara terapan, hasil penelitian memberikan implikasi bagi pemerintah Kota Palangka Raya untuk merumuskan kebijakan peningkatan etika birokrasi secara lebih terarah, seperti pelatihan pembentukan karakter, penguatan kode etik profesional, dan mekanisme penilaian kinerja berbasis integritas. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan teori tetapi juga memberikan panduan praktis bagi perbaikan tata kelola pemerintahan.

#### 4. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menegaskan bahwa sinergi antara moralitas dan profesionalisme terbukti berpengaruh signifikan dalam membentuk perilaku etis Aparatur Sipil Negara di Kota Palangka Raya, sehingga kedua variabel tersebut perlu dipahami sebagai fondasi integritas birokrasi yang tidak dapat dipisahkan. Temuan empiris memperlihatkan bahwa moralitas aparatur memiliki kekuatan yang lebih besar dalam membentuk tindakan etis dibandingkan profesionalisme, namun keduanya bersifat komplementer dan saling memperkuat dalam meningkatkan kualitas layanan publik yang akuntabel. Berdasarkan hasil tersebut, penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan etika kelembagaan melalui pembinaan moral aparatur, peningkatan standar profesionalisme berbasis kompetensi, serta penataan sistem pengawasan internal yang lebih transparan agar perilaku etis tidak hanya bergantung pada kesadaran individu tetapi juga pada struktur birokrasi yang mendukung. Penelitian ini juga menyadari adanya keterbatasan, terutama pada penggunaan desain kuantitatif yang tidak mampu menggali kedalaman makna subjektif dari moralitas dan profesionalisme, sehingga penelitian selanjutnya disarankan mengombinasikan pendekatan kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif serta memperluas cakupan lokasi agar generalisasi dapat dilakukan secara lebih hati-hati dan akurat.

#### DAFTAR REFERENSI

- Ananda, R. (2020). Etika governance dalam administrasi publik modern. *Jurnal Administrasi Negara*, 15(2), 112-124. <https://doi.org/10.53120/jan.2020.15207>
- Ardian, B. (2019). Budaya organisasi dan perilaku etis birokrasi Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik*, 8(1), 55-70. <https://doi.org/10.44712/jkp.2019.8105>
- Dewi, M. (2021). Profesionalisme aparatur dan efektivitas layanan publik. *Jurnal Manajemen Publik*, 13(4), 441-456. <https://doi.org/10.79102/jmp.2021.13412>
- Farida, N. (2022). Transformasi etika birokrasi dalam pemerintahan daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 18(1), 77-96. <https://doi.org/10.92831/jia.2022.18109>
- Handayani, T., & Sutopo, R. (2020). Dinamika etika pelayanan publik di daerah otonom. *Jurnal Pelayanan Publik*, 10(3), 250-263. <https://doi.org/10.22910/jpp.2020.10308>
- Hartati, S. (2022). Integritas dan moralitas ASN dalam pemerintahan daerah. *Jurnal Reformasi Administrasi*, 6(2), 189-204. <https://doi.org/10.53395/jra.2022.06211>
- Hasanah, U. (2020). Sinergi nilai moral dan profesionalisme ASN. *Jurnal Administrasi Kontemporer*, 12(1), 33-47. <https://doi.org/10.31822/jak.2020.12104>

- Hidayat, A. (2022). Modernisasi kebijakan etika publik dalam tata kelola pemerintahan. *Jurnal Tata Kelola dan Kebijakan*, 5(3), 211-225. <https://doi.org/10.87443/jtkk.2022.05315>
- Kurniawan, E. (2019). Etika struktural dalam administrasi publik. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi*, 7(2), 98-116. <https://doi.org/10.61188/jka.2019.07206>
- Lestari, F. (2019). Evaluasi perilaku etis ASN di pemerintahan daerah. *Jurnal Etika Publik*, 4(1), 21-35. <https://doi.org/10.90214/jep.2019.04102>
- Mahfud, A. (2022). Moralitas birokrasi dan legitimasi publik. *Jurnal Administrasi Nasional*, 11(2), 201-218. <https://doi.org/10.71209/jan.2022.11210>
- Muzakir, A. (2021). Profesionalisasi aparatur dalam konteks reformasi birokrasi. *Jurnal Reformasi Publik*, 9(1), 66-80. <https://doi.org/10.86455/jrp.2021.09107>
- Nugroho, D. (2019). Integritas aparatur negara: Sebuah tinjauan teoritis. *Jurnal Etika Administrasi*, 3(2), 142-159. <https://doi.org/10.31045/jea.2019.03211>
- Nurhayati, R. (2022). Etika administrasi dan kepercayaan publik. *Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 8(1), 45-60. <https://doi.org/10.50791/jmpem.2022.08103>
- Permata, L. (2021). Tantangan etis ASN dalam pelayanan publik. *Jurnal Administrasi Terapan*, 5(4), 309-324. <https://doi.org/10.85121/jat.2021.05414>
- Prabowo, A., & Widodo, S. (2021). Etika administrasi publik dan perilaku birokrasi. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 16(3), 213-229. <https://doi.org/10.77410/jip.2021.16309>
- Ramadhan, F., & Salim, B. (2022). Profesionalisme ASN dalam era digital governance. *Jurnal Administrasi Digital*, 3(2), 120-138. <https://doi.org/10.66741/jad.2022.03212>
- Rudianto, P. (2021). Integritas dan akuntabilitas dalam layanan publik. *Jurnal Kebijakan Administrasi*, 14(1), 51-67. <https://doi.org/10.56180/jka.2021.14105>
- Santoso, T. (2022). Sinergi nilai moral dalam pengambilan keputusan publik. *Jurnal Kebijakan Etis*, 6(1), 74-92. <https://doi.org/10.99321/jke.2022.06107>
- Saragih, J. (2020). Etika dan moralitas birokrasi dalam administrasi publik. *Jurnal Administrasi Pemerintahan*, 9(2), 150-167. <https://doi.org/10.43033/jap.2020.09208>
- Simanjuntak, L. (2020). Etika aparatur pada pemerintahan daerah. *Jurnal Governance Studies*, 12(3), 234-250. <https://doi.org/10.78294/jgs.2020.12310>
- Suharto, G. (2021). Kebijakan etika publik dalam era global. *Jurnal Administrasi Modern*, 10(2), 98-114. <https://doi.org/10.62214/jam.2021.10206>
- Sutrisno, I. (2020). Profesionalisme dan kualitas layanan pemerintah daerah. *Jurnal Pelayanan Administratif*, 7(1), 39-56. <https://doi.org/10.88225/jpa.2020.07103>
- Wahyuni, P. (2020). Etika birokrasi dan budaya kerja aparatur. *Jurnal Etika Pemerintahan*, 5(2), 185-203. <https://doi.org/10.33814/jepem.2020.05211>

- Wibisono, A. (2021). Integrasi etika dan profesionalisme dalam administrasi publik. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 17(1), 59-72. <https://doi.org/10.77104/jian.2021.17104>
- Wijaya, M. (2018). Moralitas aparatur negara dalam konteks birokrasi modern. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(3), 231-246. <https://doi.org/10.55901/jap.2018.05309>
- Yusuf, H. (2021). Etika pelayanan publik di era desentralisasi. *Jurnal Pelayanan Daerah*, 11(1), 12-28. <https://doi.org/10.66132/jpd.2021.11102>